

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh:

DWI IRIANI MARGAYANINGSIH

ABSTRAK

Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Masalah kemiskinan yang merupakan kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negative seperti bangsanya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan yang adil tanpa mengecualikan rakyat miskin diperlukan kemandirian dengan cara membudayakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan.

**Kata Kunci : Pemberdayaan
Masyarakat**

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan yang multidimensional. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah masalah kemiskinan dan langkah-langkah pemecahannya. Dari segi normatif, penanggulangan

kemiskinan merupakan salah satu tujuan negara yang harus dicapai. Dari segi teoritis, pengkajian terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari paradigm pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Paradigma pembangunan menawarkan berbagai rumusan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling sesuai atau paling tidak mendekati kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Pendekatan empiris sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan bersumber dari pengalaman pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditempatkan dalam bingkai proses perubahan struktur (*transformasi struktural*) yang sedang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan. (Michael P. Todaro, 1992, hlm. 415)

Pembangunan yang dipandang sebagai suatu proses transformasi pada dasarnya akan membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat, dan proses akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan dan

kesejahteraan. (Hollis B. Chenery dan Moises Syrquin, 1975). Dalam proses tersebut putaran kegiatan ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan kemudian hasil pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Proses transformasi tersebut dalam kerangka teoritik dikenal sebagai proses alamiah atau natural. Dalam kerangka teoritik pula proses tersebut mensyaratkan dipenuhinya tiga asumsi dasar. Pertama, peran serta atau partisipasi penuh (*full employment*) artinya semua faktor-faktor produksi dan setiap pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Kedua, homogenitas artinya semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi dan mempunyai kesempatan berusaha dan kemampuan menghasilkan atau produktivitas yang sama. Dan ketiga, rasionalitas, prinsip efisiensi atau bekerjanya mekanisme pasar artinya interaksi antarpelaku pembangunan terjadi dalam keseimbangan sehingga imbalan yang diterima oleh pelaku pembangunan seimbang dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari 8 agenda Millennium Development Goals (MDG's) 1990-2015. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolute (*extreme poverty*); tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995), maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.

Dalam "pemberdayaan masyarakat" sebagai terjemahan dari kata "*empowerment*" mulai ramai digunakan dalam bahasa

sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topic dan kata kunci dari upaya pembangunan.

World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 October – Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari Strategi Trisula (*three-pronged strategy*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang (*promoting opportunity*) fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) dan peningkatan keamanan (*enhancing security*).

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan (2007) mengutip pendapat Fear and Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai :

“a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where

the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”.

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, & Canda, (1998) secara singkat menyatakannya sebagai berikut :

Empowerment-“process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives.

In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals”.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas’oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996). Selain itu, konsep pemberdayaan juga dikemukakan oleh banyak kalangan sebagai berikut :

(1) Rappaport, (Weissberg, 1999) mengartikan :

Empowerment is viewed as a process : the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives

(2) Schneider, (1999) menyatakan bahwa :

Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally "taking over power from somebody else" at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, rights, and 'voice' as well as financial and material resources.

(3) Hacker, 1999, menyebutkan :

Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening of individual's opportunities.

(4) Osmani, (2000), mendefinisikan pemberdayaan sebagai :

Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance.

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, Dharmawan (2000) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai :

" A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living"

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :

- (a) Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- (b) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987).

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi, kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap

sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Karena itu, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- 4) Terjaminnya keamanan;
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984)

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994)

Berkaitan dengan kekuasaan, ide utama pemberdayaan

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

(1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

(2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Sumodiningrat (1997) menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.

Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui issue-issue local, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington (2000) yaitu :

Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang

(*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya

pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Tentang hal ini, salah satu kesimpulan Laporan Pembangunan Dunia 2002 bertajuk "Membangun Lembaga Pendukung Pasar" yang dirilis Bank Dunia (Oktober 2001) adalah :

Adanya sejumlah kelemahan struktural yang masih menjadi kendala utama pembangunan di negara sedang berkembang. Kelemahan structural itu antara lain lemahnya kelembagaan pemerintah, ketidakpastian hukum, lembaga peradilan yang korup, sistem kredit yang bias, serta proses perijinan yang berbelit. Hal ini yang menyebabkan proses pembangunan di Negara sedang berkembang (NSB)

terhambat. Bila NSB dapat mengatasi kendala tadi mereka bisa meningkatkan pendapatannya secara drastis dan mengurangi kemiskinan. Tentunya harus sistematis dengan membentuk lembaga-lembaga baru sesuai kebutuhan masyarakat. (Harian Media Indonesia, 12 November 2001).

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Subejo dan Narimo (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action dan networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang lain, sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional (*indigenous-technology*), dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, merupakan proses “penyadaran” baik penyadaran tentang keberadaannya, masalah-

masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Frère (1973) mengartikan pemberdayaan bidang pendidikan merupakan praktik pembebasan diri dari ketidaktahuan, tekanan-tekanan, dan lain-lain hal yang membelenggu seseorang dan atau kelompok masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Pendidikan sebagai praktik pembebasan, juga termasuk membebaskan diri dari sistem sekolah.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, juga berarti kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan.

Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai penyediaan layanan kesehatan dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan “modern” dan atau pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Pemberdayaan bidang kesehatan, juga menyangkut

kemandirian masyarakat untuk mengorganisir lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM, KSM, PKK, Dasawisma, Posyandu, dll) untuk menanggulangi faktor resiko penyakit dan menghimpun iuran kesehatan, termasuk meningkatkan kemampuan untuk memerangi kapitalisasi medik yang lebih menekankan praktik-praktik kuratif disbanding preventif dan promotif.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, mencakup upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam dunia bisnis, pengertian power dikaitkan dengan kemampuan atau produktivitas. Karena itu, pemberdayaan atau empowerment diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi, ataupun sistem. Di pihak lain, power juga dapat diartikan sebagai keunggulan bersaing atau posisi-tawar (*bargaining position*). Karena itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai penguatan atau peningkatan keunggulan bersaing atau posisi tawar.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa :

modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 2003).

Di bidang sosial-politik, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Menurut Dhal (1963) pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan "kekuatan" atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi. Di samping itu, dalam hubungan ini, pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil (Paul, 1987),

agar “yang lemah” memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kehidupan maupun keberlanjutan pembangunan yang bertujuan untuk terus-menerus memperbaiki mutu hidup.

2. Dilema Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun terdapat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, tetapi Aditya (2003), mengungkapkan beragam dilema dalam pelaksanaannya.

Pertama, harus diakui bahwa sejak awal 1990-an, Pemerintahan Indonesia mulai mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan (*alleviation poverty and poverty reduction*).

Upaya ini dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Di satu sisi, kemiskinan dipandang sebagai keadaan yang absolute dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan diseragamkan lalu dipakai sebagai dasar menyusun proyek pengentasannya.

Pada kenyataannya kemiskinan memberikan wajahnya yang relatif. Kemiskinan juga menyangkut bagaimana kondisi sosial mendefinisikannya. Seseorang bisa jadi tidak miskin dalam kehidupan komunitas kultural dan geografis tertentu meski secara absolut ia didefinisikan sebagai miskin. Artinya upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti.

Kedua, berkaitan dengan relativitas dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan merupakan masalah tersendiri, karena keberhasilan sendiri masih diperdebatkan dalam konteks teknis atau substantif. Evaluasi proyek pemberdayaan hampir selalu dilakukan dengan mengukur keberhasilan yang menyangkut bagaimana sebuah program dilaksanakan serta bagaimana anggaran yang direncanakan dapat diimplementasikan namun sering

luput melihat sisi substansial dari tujuan pemberdayaan itu sendiri. Sementara itu di lain pihak substansi pemberdayaan sendiri terus diperdebatkan myangkut pemahaman akan masyarakat yang berdaya dan siapa yang mendefinisikannya.

Ketiga, bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan seringkali justru tidak menjawab masalah ketidakberdayaan itu. Pemberian bantuan biasanya berupa sejumlah dana sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sarannya.

Keempat, myangkut keberlanjutan program / kegiatan. Di satu pihak, banyak program / kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana masyarakat sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, ternyata tidak terjaga

keberlanjutannya. Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat dalam bentuk penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Dalam kondisi tertentu upaya ini mampu menjawab problem ketergantungan namun kondisi yang tertentu pula upaya ini menjadi lambat bergerak.

Kelima, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri.

Keenam, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak coba dilibatkan untuk menjalin kerjasama mewujudkan keberdayaan. Namun program ini akan menjadi sia-sia kalau masing-

masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama.

Ketujuh, isu globalisasi, menghadapi Negara tentang pentingnya pasar dan ada upaya – upaya untuk menyusutkan peran negara padahal, ketidak berdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidak berdayaan batu dimana negara hanya akan menjadi penonton saja. Kritik Pierre Bourdieu atas paham ini menyebutkan bahwa dunia akan berada dalam kondisi sebagaimana gambaran teori Darwin tentang seleksi alam (*the survival of the fittest*) dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya.

Kedelapan, dalam konteks Indonesia, Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilema yang dihadapi bangsa Indonesia adalah karena kita

punya kensepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

3. Pemberdayaan Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia (dan beberapa Negara yang lain) adalah kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsure-unsur

yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut dengan ketahanan nasional.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implicit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber

infrmasi, serta keterampilan manajemen.

Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan public (*public policies*) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.

Selanjutnya berturut-turut perlu dibahas tujuan pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,

yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut alternative development, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antithetical*”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa

dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), “*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*”. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, the right kind of growth”, yakni bukan yang vertikal menghasilkan “*trickle-down*”, seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni “*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*” (Ranis, 1995).

Hasil kajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi Negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Pengalaman di Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu Negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rasionya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya;

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana

terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan harus menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang penting di sini adalah, peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Friedman (1992) menyatakan

“The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy),

direct (participatory) democracy, and experiential social learning”.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri

kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

4. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate*

economic growth, gender equality and intergenerational equity".

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*". Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), "*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*".

Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "*the right kind of growth*", yakni bukan yang vertical menghasilkan "*trickle-down*", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*" (Ranis, 1995).

Hasil kajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang

dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi Negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- (1) Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
- (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
- (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideology yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan

- (4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideology secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminology pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya (power). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsure-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan.

Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam

pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan.

Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari

dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis

usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai

budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan / pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*People Centered Development*), diawali dengan pemahaman tentang *Ekologi Manusia*, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan salah satu kajian dari ekologi. Soerjani (1992) menyatakan bahwa ekosistem dikaji oleh Ekologi, sedangkan lingkungan hidup dikaji oleh Ilmu Lingkungan yang landasan pokoknya adalah Ekologi, serta

dengan memperhatikan disiplin lain, terutama Ekonomi dan Sosiologi.

Ekologi Manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat. Adapun landasan Ilmu Lingkungan adalah Ekologi, maka Ilmu Lingkungan dapat disebut sebagai *Ekologi Terapan (Applied Ecology)* yakni penerapan prinsip dan konsep Ekologi dalam kehidupan manusia. Perspektif Ilmu Lingkungan dalam paradigma pembangunan dikenal sebagai *Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (Environmental Development)*, yang akan diuraikan pada pokok bahasan selanjutnya.

Lebih lanjut Soerjani mengatakan bahwa Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbale-balik makhluk hidup (biotic) sesamanya dan dengan benda-benda non-hidup (abiotik) di sekitarnya. Jadi Ekologi adalah juga ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup dan lingkungannya.

Sebagian bagian dari makhluk hidup, peranan dan perilaku manusia dipelajari secara khusus dalam Ekologi Manusia, sehingga Ekologi Manusia berarti Ekologi yang memusatkan pengkajian pada manusia sebagai individu maupun

sebagai populasi dalam suatu ekosistem.

Ekologi dan Ekonomi adalah dua hal yang berakar kata yang sama : *oikos* (rumah tangga), yang satu tentang rumah tangga, yang kedua tentang pengelolaan rumah. Antara kedua pandangan tersebut tidak jarang keduanya berbenturan satu sama lain. Seolah-olah keduanya berada dalam dua jaringan atau sistem yang berbeda. Padahal sebenarnya rumah tangga manusia itu juga merupakan bagian, atau harus berada secara serasi dan didukung secara berkesinambungan (sustainable) dalam dan oleh rumah tangga makhluk hidup di lingkungannya. Benturan tersebut terjadi berakar dari pengaturan tata ruang dalam ekosistem. (Soerjani, 1992)

Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negative, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusat pada rakyat.

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan absolute, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Prioritas awal diperuntukkan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan antithesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi.

Untuk model pembangunan yang berorientasi pada produksi ini, termasuk di dalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Secara sederhana, Korten (1993) menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatian pada :

- (1) Industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian;
- (2) Daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan;
- (3) Pemilikan aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas;
- (4) Investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang

sedikit dan bukannya yang banyak;

- (5) Penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal, sehingga sumber daya modal dimanfaatkan sedangkan sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal;
- (6) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil sumber daya, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan penguasaan basis sumber daya alami secara cepat;
- (7) Efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya local, sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal energy; kurang daya adaptasi dan mudah mengalami gangguan yang serius karena

kerusakan atau manipulasi politik dalam suatu bagian sistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu alternative baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Karena itu pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Korten (1993) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material

dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu :

- (1) Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
- (2) Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin;
- (3) Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya;
- (4) Berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Terkait dengan hal ini, Subejo dan Supriyanto (1995) mengungkapkan bahwa terminologi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan

dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam praktiknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

C. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian tentang kemiskinan sangat beragam, hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang dan ideologi masing-masing penganutnya. Kemiskinan bisa dimulai dari sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha sampai pengertian yang luas baik aspek sosial dan moral.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak yang menjadi dasar masyarakat desa diantaranya terpenuhinya kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Untuk mewujudkannya, BAPPENAS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang di dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar

menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normative dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari ; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses

terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

D. Strategi, Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Diperlukan suatu strategi atau arah baru dari kebijakan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah. *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Dan *ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pementapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Strategi pembangunan seperti itu perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan

struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan akan menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati adalah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Dalam proses perubahan struktur diperlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju. Dengan sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lemah untuk lebih maju. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, tetapi harus

dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat diantara yang telah maju dengan yang belum berkembang lemah atas dasar saling menguntungkan.

Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

Bobot dan jenis masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin di perdesaan dan di perkotaan, baik di Jawa maupun Luar Jawa tidaklah sama. Kebebasan diberikan kepada masyarakat dan aparat setempat

dengan mempertimbangkan kesesuaian potensi, kondisi dan permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pendelegasian wewenang atau desentralisasi perlu diupayakan pada tingkat pemerintahan serendah mungkin, khususnya daerah otonom.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, maka mekanisme pembentukan modal (*capital accumulation*) yang benar merupakan kunci dari pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang. Proses pemupukan modal yang benar muncul dari dalam sendiri yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dinikmati masyarakat sehingga tumbuh berkembang secara alamiah. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat disyaratkan berperanserta dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.

GBHN menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada upaya untuk membangun masyarakat yang makin berkeadilan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi

peluang kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis menggerakkan dan memacu pembangunan di segala bidang sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pelaksanaan unsur pertama Trilogi Pembangunan mensyaratkan bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus juga mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pemerataan pembangunan berarti pemanfaatan semua potensi yang ada secara optimal bagi pembentukan landasan pembangunan yang luas dan kuat berdasarkan kemampuan sendiri. Dengan makin meningkatkan dan meluasnya pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya diharapkan akan makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat sehingga diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan berkurang.

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok. *Pertama*, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. *Kedua*, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. *Ketiga*, kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula termasuk penciptaan ketenteraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu : (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap informasi pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan perlu diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.

Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan

penduduk miskin dilokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Penyiapan penduduk ini bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi amat penting dalam proses transisi ini. Bagian dari kebijaksanaan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang member layanan kepada penduduk miskin. Kebijakan ini dilaksanakan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik, ***Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia, 1976-1990***, Jakarta : BPS, 1991.

_____, ***Penyempurnaan Metode Perhitungan Desa Tertinggal***, Jakarta : BPS, 1994.

_____, ***Laporan Hasil Sensus Pertanian 1993 : Pendaftaran Rumahtangga***, Jakarta : BPS 1994

Chenery, Hollis B. dan Moshe Syrquin, ***Patterns of Development 1950-1970***, Oxford University Press, 1975.

Ginandjar Kartasasmita, ***Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Rangka Membangun Bangsa Yang Mandiri***, makalah disampaikan pada Sidang Pleno XXXVIII Dewan, Probolinggo, 1993.

_____, ***Program IDT sebagai Gerakan Nasional Menanggulangi Masalah Kemiskinan***, makalah disampaikan pada Rapat Konsolidasi Regional Pembangunan Wilayah NTB, NTT, Tim-Tim, Maluku, Irija di Kupang, 14 September 1994.

_____, ***Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan***, CIDES Jakarta, 1996.

Korten, David C., ***People Centered Development***, West Ilarford, Kumarian Press, 1984

Sajogyo, ***Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat***,

- Jakarta, Bina Rena Pariwara, 1996.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, **Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik**, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Aditya, T. 2009. *Teori Pemberdayaan dan Advokasi*. <http://id.teguh.web.id/>
- Anonim, *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*; Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Departemen Dalam Negeri, 1994.
- Brown, Donald. "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People : From Impoverishment to Empowerment*. New York : New York University Press, 1995.
- Chambers, Robert. *Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts*, Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), 1995. *People : From Impoverishment to Empowerment*. New York University Press, 1995.
- Dharmawan, A.H. 2006. Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian : Klasik dan Kontemporer Makalah disampaikan pada "Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian daerah bagi Tenaga Pemandu Teknologi Pendukung Prima Tani", di Cisarua Bogor, 19-25 November 2006.
- Friedman, J. 1992, *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Cambridge :Blackwell.
- Kartasasmita, G 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES;
- Korten, D.C. dan Sjahrir. (ed.). 1993. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ood, 1993. *Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam *Prospektif* Vol.5 No.2 (1993)
- Mitchel, Terence R. 1982. *Motivation : New Direction for Theory Research and Practice*. *Academy of Management Review*.
- Mitchel, T. (1973), "Motivation and Participation : an integration", *Academy of Management Journal*, Vol. 16 No. 4, pp. 670 – 9.
- Osmani, S. R. 2000. *Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty Reduction*. SEPED Conference Paper Series No. 7. UNDP. Washington, D.C.
- Robbins, Stephen P. Mary Coulter. 1999. *Management*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Subejo dan Iwamoto, Noriaki, 2003, *Labor Institutions in Rural Java : A Case Study in Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo.
- Subejo dan Supriyanto, 2005, *Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian No. 1 Juli (2005)*. 17-32

Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta : Bina Reka Pariwara

Weissberg, R. 1999. *The Politics of Empowerment*. Praeger. Westport, Connecticut and London.

World Bank. 2001. *Attacking poverty with a three-pronged strategy*. *World Bank Policy and Research Bulletin* Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober-Desember 2000/Januari-Maret 2001

World Bank. 2001. *Sustainable Development in the 21 Century*.

PNPM P2KP Mandiri Perkotaan